

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN
IMPLEMENTASI BASEL II TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Strata Satu**



Oleh

AULIATA GUSTI RAHAYU

NPM 1512120028

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG**

2019



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi atau karya pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2019



Auliata Gusti Rahayu
NPM. 1512120028

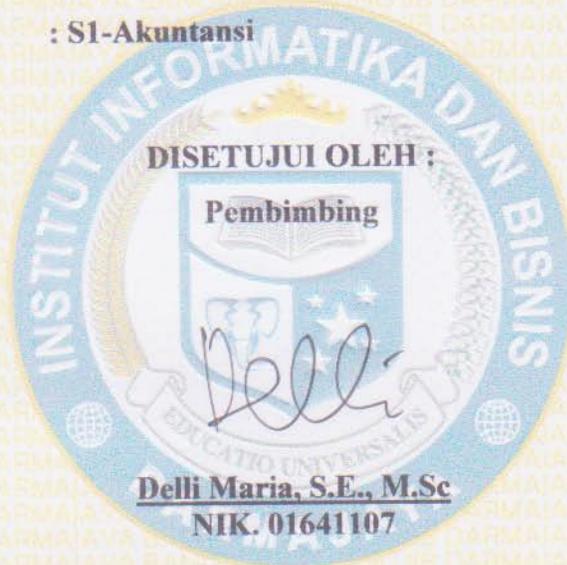
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN
IMPLEMENTASI BASEL II TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH**

Nama Mahasiswa : **Auliata Gusti Rahayu**

NPM : **1512120028**

Program Studi : **S1-Akuntansi**



Ketua Program Studi Akuntansi

Anik Irawati, S.E., M.Sc
NIK. 01170305

HALAMAN PENGESAHAN

**Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi IIB Darmajaya dan dinyatakan diterima
untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar**

SARJANA EKONOMI



MENGESAHKAN

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji

:M. Sadat Husein Pulungan, S.E., M.M.,M.S.Ak

Anggota Penguji : Dedi Putra, S.E., M.S.Ak

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
IIB Darmajaya**

Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, M.S., Ph.D

NIK. 14580718

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8Maret 2019

RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

- a. Nama : Auliata Gusti Rahayu
- b. NPM : 1512120028
- c. Tempat, Tanggal Lahir : Sinar Luas, 23 Agustus 1997
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Dusun I Sinar Luas
RT/RW 002/001 Kec. Bangun Rejo
Lampung Tengah
- f. Suku : Semendo
- g. Kewarganegaraan : Indonesia
- h. E-mail : auliata97@gmail.com
- i. HP : 0856-5870-9589

2. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Bangun Rejo
- b. Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 2 Bangun Rejo
- c. Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Bangun Rejo

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan di atas adalah benar.

Yang Menyatakan

Bandar Lampung, April 2019

AULIATA GUSTI RAHAYU
NPM. 1512120028

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, serta puji syukur kepada Allah Subhanahu
Wa Ta'ala atas terselesaikannya skripsi ini.

Kupersembahkan karyaku ini untuk :

Kepada Bapakku tercinta Bapak Aulia Sobri (Alm)

Kepada kedua orang tuaku Muhammad Salim dan Ita Kumalasari

Kepada Woh Aulia Ihsan

Kepada adik- adikku

Kepada teman-teman seperjuanganku

Almamaterku Tercinta

“IIB DARMAJAYA”

MOTTO

“Everyone is a genius, but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”
(Albert Einstein)

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. ”
(Al- Insyiroh: 6-8)

“jika ingin menjadi putih jadilah putih, jika ingin menjadi hitam jadilah hitam. Jangan menjadi pribadi yang abu-abu ”
(Auliata Gusti Rahayu)

**PENGARUH PENERAPAN BASEL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)**

**Oleh
Arika Dina Pertiwi**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan basel dan *Good Corporate Governance* terhadap manajemen risiko pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2014-2017.

Penelitian mengenai prediksi *financial distress* ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2017. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR sebagai variabel basel berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko sedangkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Basel, Good Corporate Governance, CAR, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah.

EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE AND BASEL II IMPLEMENTATION ON SHARIA BANKING FINANCIAL PERFORMANCE

By

Auliata Gusti Rahayu

ABSTRACT

The objective of this research was finding out the effect of the corporate governance and the Basel II implementation on the financial performance of Sharia Banks in Indonesia in the period of 2015 to 2017. The type of this research was the quantitative descriptive research. The type of the data used in this research was the secondary data in the form of annual financial reports. The population of this research was 12 Sharia Banks in Indonesia. The sampling technique used in the research was the purposive sampling. The data analyzing technique used in this research was through the multiple linear regression analysis. The analytical tool used in this research was SPSS version 20. The result of this research showed that the size of the board of directors and CAR had a significant effect on the financial performance; however, the size of the board of commissioner, the size of the audit committee, the size of the board of sharia supervisor did not have a significant effect on the financial performance.

Keywords: Financial Performance, Size of Board of Commissioner, Size of Board of Director, Size of Audit Committee, Size of Board of Sharia Supervisor, CAR



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahirobbilalamin, atas rahmat Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN IMPLEMENTASI BASEL II TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Perguruan Tinggi IIB Darmajaya Bandar Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa isi yang tersaji di dalamnya masih banyak memerlukan perbaikan, karena keterbatasan penulis baik keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun pengalaman. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima arahan, bimbingan, dan petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ir. Firmansyah YA, MBA.,M.Sc selaku Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
3. Bapak Dr. RZ. Abdul Aziz, S.T.,M.T., selaku Wakil Rektor I Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
4. Bapak Roni Nazar, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor II Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
5. Bapak Muprihan Thaib, S.Sos., M.M., Selaku Wakil Rektor III Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
6. Bapak Prof.Ir.H. Zulkarnain Lubis, M.S., Ph.D., Selaku Wakil Rektor IV dan juga Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
7. Ibu Anik Irawati, S.E.,M.Sc., selaku Ketua Jurusan Akuntansi IIB Darmajaya

8. Ibu Delli Maria., S.E., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
9. Para dosen, Staf dan Karyawan IIB Darmajaya yang telah memberikan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung selama penulis menjadi mahasiswi di IIB Darmajaya.
10. Teristimewa untuk Bapak/Ayah dan Ibu, terima kasih sudah menjadi orang tua paling hebat untukku.
11. Terimakasih kepada Keluarga Besarku (Woh Isan/Woh Deti, Cik Arul, Cik Arul, Mamah/Papah, Nenek Mak/Bak, Woh Ibu /Woh Ayah, Woh cicik Da/Woh Tri). Kakak & adikku (Kang Dian/Kak Ganda, Ayuk Leni/Kak Chandra, Kak Aji/Mba Uli, Leona, Puja) dan semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil yang diberikan selama ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuanganku (Arika, Liya, Eka dan Martina). Grup Akhwat Assalam angkatan 2015 (Sindi, Puput, Triday, Rika Ati, Beta, Nadya, Ines, Wulan). Terima kasih atas bantuan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini.
13. Tema-teman Jurusan S1 Akuntansi angkatan 2015 dan kakak tingkat serta semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan selama ini.
14. Almamaterku tercinta, IBI Darmajaya yang sudah memberi banyak wawasan dan pengalaman berharga.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, hal ini dilakukan karena keterbatasan penulis semata. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan penulis selanjutnya.

Bandar Lampung, April 2019

Penulis

Auliata Gusti Rahayu

NPM. 1512120028

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Masalah	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 <i>Grand Theory</i>	11
2.2 Kinerja Keuangan Syariah	13
2.3 Tata Kelola Usaha	17
2.4 Basel II (<i>Basel Capital Accord</i>)	32
2.5 Penelitian Terdahulu.....	35
2.6 Kerangka Pemikiran	38
2.7 Bangunan Hipotesis	38
2.7.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	38

2.7.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	39
2.7.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.	40
2.7.4 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	41
2.7.5 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	43
3.1.1 Sumber Data.....	43
3.1.2 Objek Penelitian.....	43
3.2 Metode Pengumpulan Data	43
3.3 Populasi dan Sampel	44
3.3.1 Populasi	44
3.3.2 Sampel	43
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	45
3.4.1 Variabel Dependen	45
3.4.2 Variabel Independen	46
3.4.2.1 Ukuran Dewan Komisaris	46
3.4.2.2 Ukuran Dewan Direksi	46
3.4.2.3 Ukuran Komite Audit	47
3.4.2.4 Ukuran Dewan Pengawas Syariah	47
3.4.2.5. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	47
3.5 Metode Analisis Data.....	48
3.5.1 Statistik Deskriptif	48
3.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji Asumsi Klasik)	48
3.5.2.1 Uji Normalitas	49
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas	49
3.5.2.3 Uji Autokorelasi	49

3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas.....	50
3.5.3 Analisi Regresi	51
3.6 Pengujian Hipotesis	51
3.6.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	52
3.6.2 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji T)	52
3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data.....	55
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	55
4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian	56
4.2 Hasil Analisis Data	56
4.2.1 Analisis deskriptif	56
4.2.2 Uji Kelayakan Model	58
4.2.2.1 Uji Normalitas Data	58
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas.....	59
4.2.2.3 Uji Autokorelasi.....	61
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	62
4.2.3 Analisis Regresi Berganda.....	64
4.2.4 Uji Koefisien Determinan R^2	66
4.3 Pengujian Hipotesis	67
4.3.1 Uji Signifikansi (Uji F)	67
4.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji T)	67
4.4 Pembahasan	69
4.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	69
4.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	70
4.4.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	71

4.4.4 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	72
4.4.5 Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	73

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	75
5.2 Keterbatasan Masalah	75
5.3 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 4.1 Proses Sampling	55
Tabel 4.2 Deskripsi Statistik Variabel Penelitian	57
Tabel 4.3 Uji Kolmogorov – Smirnov Test	59
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Run Tes	61
Tabel 4.7 Uji Regresi Linier Berganda	63
Tabel 4.8 Uji R Square	65
Tabel 4.9 Uji Signifikansi (Uji F)	66
Tabel 4.10 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji T).....	67

Daftar Grafik

	Halaman
Grafik 1.1 <i>Return On Asset</i>	2
Grafik 4.1 Diagram Scatterplot	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan ialah penghimpunan dana badan usaha dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2010).

Sistem operasional perbankan dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang produk dan operasionalnya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad ﷺ. Perbankan syariah tidak mengandalkan bunga karena bunga merupakan *riba* dan hal tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan. Larangan untuk meminjam atau memungut biaya terkategori haram diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan (Dorry Dermawan, 2014).

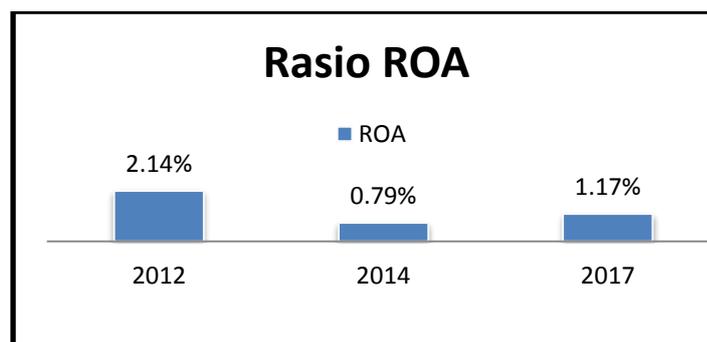
Sedangkan dalam sistem perbankan konvensional hampir tidak mungkin terlepas dari hal-hal tersebut dalam kegiatan investasinya, misalnya seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman yang didalamnya terkandung bahan-bahan yang haram, usaha media atau hiburan yang didalamnya bertentangan dengan syariat islam, dan lain-lain.

Regulasi mengenai bank syariah Di Indonesia, tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan jenisnya, yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa adalah

bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya (Buku Bank & Lembaga Keuangan Syariah edisi dua, Dr.Andri Soemitra, M.A.,2009).

Perkembangan perbankan syariah saat ini masih jauh dari harapan. Kinerja keuangan bank syariah tak sekinclong bank konvensional. Masalah *governance* atau tata kelola di bank syariah masih harus terus ditingkatkan. Dalam tulisan Eko B. Supriyanto, seorang Pemerhati Perbankan mengatakan bahwa menurut catatan Biro Riset Infobank (birI), kinerja perbankan syariah tak kunjung membaik sejak 2012. Kejatuhan harga komoditas dan mineral juga menyebabkan perbankan syariah harus bergelut dengan pembiayaan bermasalah (Lulu Badriyah, 2018).

Grafik 1.1 *Return On Asset*



Return on asset (ROA) perbankan syariah masih terus menurun. Pada 2012 ROA perbankan syariah masih bertengger di 2,14%, setahun berikutnya menurun hingga puncaknya terjadi pada 2014 dengan ROA 0,79%. Pada 2017 ROA perbankan syariah sebesar 1,17%. Secara kualitas, perbankan syariah belum membaik (sumber : <http://infobanknews.com> disposting agustus 2018).

Perkembangan sistem perekonomian dan perbankan Islam mulai dikenal dan diminati masyarakat Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Bank syariah tidak mengalami masalah karena sistem bagi hasil. Namun, jika dilihat lebih dalam, sejatinya bukan semata bagi hasil. Waktu krisis lalu, portofolio pembiayaan bank syariah lebih dominan ke usaha kecil dan tidak ada

unsur dolar. Bank-bank yang bermasalah adalah bank dengan pembiayaan dolar Amerika Serikat (AS) dan kredit korporasi (Eko B. Supriyanto, 2018).

Kegagalan lain bank syariah yang paling mendasar adalah menyangkut tata kelola dan mengelola risiko. Banyak bank syariah jatuh pada lubang yang sama, yaitu menyangkut tata kelola dan tergoda hendak membiayai apa yang dibiayai oleh bank konvensional. Baird (2000) mengemukakan bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga berbagai negara di Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta.

Tata kelola usaha yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan kinerja saham serta dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Dey Report dalam Kusumawati dan Riyanto, 2005). Secara teoritis praktek tata kelola usaha dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang dapat merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan umumnya tata kelola usaha dapat meningkatkan kepercayaan investor (Tjager dalam Lastanti, 2004).

Kelahiran sistem Tata Kelola Usaha pada bank syariah berawal dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Usaha bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menekankan perlunya penerapan sistem Tata Kelola Usaha pada perbankan. Ini disebabkan karena Tata Kelola Usaha yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah (Nur Hisamuddin dan M. Yayang Tirta K, 2010).

Penerapan sistem Tata Kelola Usaha pada bank syariah menjadi sangat penting karena bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional. Prasetyo dan Indradie (2009) mengatakan bahwa. Pelaksanaan Tata Kelola Usaha yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI

tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu, perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam diharapkan menjadi uswah hasanah dalam penerapan sistem Tata Kelola Usaha. Bank Syariah diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah.

Penerapan sistem Tata Kelola Usaha dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Sejalan dengan makin berkembangnya dunia keuangan yang semakin kompleks dan dinamisnya produk-produk perbankan, Bank terpapar jenis risiko yang lebih meningkat dari periode sebelumnya, sehingga membutuhkan teknik baru dalam menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan *risk appetite*-nya.

Basel II adalah rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua, sebagai penyempurnaan Basel I, yang diterbitkan oleh Komite Basel. Rekomendasi ini ditujukan untuk menciptakan suatu standar internasional yang dapat digunakan regulator perbankan untuk membuat ketentuan berapa banyak modal yang harus disisihkan bank sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan dan operasional yang mungkin dihadapi bank. BCBS mengeluarkan dokumen "*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – Revised Framework*" pada tahun 2004 atau yang disebut dengan Basel II untuk mengantisipasi perkembangan tersebut. Implementasi *Basel Capital Accord II* di Indonesia merupakan pengembangan dan peningkatan kualitas Kinerja Keuangan oleh perbankan syariah nasional dan dibantu dengan Tata Kelola Usaha yang merupakan rangkaian proses, kebijakan, aturan, dan institusi yang mengontrol suatu perusahaan maupun korporasi. Oleh karena itu, penerapan tata kelola usaha dan implementasi basel pada bank syariah sangatlah penting. Pernyataan inilah

yang mendorong penulis untuk mengetahui pengaruh penerapan tata kelola usaha dan implementasi basel terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan, baik atau buruknya nilai perusahaan sangat berdampak pada bagaimana pihak perusahaan mengelolanya. Masing-masing bank memiliki cara kerja yang berbeda dalam mengembangkan usahanya sehingga prestasi atau kinerjanya pun berlainan. Perusahaan dapat menentukan struktur keuangan dengan lebih baik melalui kinerja keuangan. Menurut Srimindatri (2006), kinerja adalah “Penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan criteria yang telah ditetapkan sbelumnya”. Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Kinerja keuangan membahas metode penilaian yang dipublikasikan dan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Penentuan ukuran-ukuran kinerja keuangan dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam. Oleh karena itu, untuk menilai suatu kinerja keuangan perusahaan, perlu dilibatkan analisis rasio keuangan.

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Sofyan Safri Harahap, 2016). Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Irfan Fahmi, 2014).

Menurut Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim (2012) mengemukakan, rasio profitabilitas terdiri dari *return on assets*, *return on equity* dan *return on common equity*. Namun penulis hanya menjelaskan satu jenis rasio profitabilitas yaitu *Return On Assets*.

Analisis *Return On Assets* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. *Return On Assets* bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan (strategi) dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*) (Gita Sapsepti, 2017).

Penelitian ini menggunakan variabel yang merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah: penelitian milik Achmad Noor Fauzi (2016) yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2011-2015) menyatakan beberapa hasil dari variable tata kelola usaha yang diperoleh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Arry Eksandy (2018) yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara penerapan tata kelola usaha terhadap kinerja keuangan. Nur Hisamuddin dan M. Yayang Tirta K (2010) yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang hasilnya bahwa terdapat pengaruh signifikan anatra variable tata kelola usaha terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dan Eko Sunarwan (2015) Pengaruh *Good Corporate Governance* (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang studi kasusnya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia memiliki hasil tidak semua variabel tata kelola usaha berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Dalam penelitian ini, penulis mereplikasi penelitian milik Achmad Noor Fauzi (2016) yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2011-2015) dengan menambahkan variable x2 yaitu Implementasi basel II dan mengganti tahun periode. Kesimpulan yang didapat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, pengaruh dari struktur atau organ dari masing-masing dewan untuk mewujudkan Tata Kelola Usaha terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan

masih beragam. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung penelitian yang sudah ada. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan Tata Kola dan menambah variabel Basel II di perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana tingkat keberhasilan perbankan syariah dalam menerapkan Tata Kelola Usaha dan Basel II serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Implementasi Basel II Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah)”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sebab dan akibat dari beberapa variabel dan menggunakan data sekunder. Objek serta alat ukur kinerja keuangan dalam penelitian merupakan data dari Laporan Tahunan dan Laporan Tata Kelola Usaha Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada ruang lingkup penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah, antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah tahun 2015-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah tahun 2015-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah tahun 2015-2017?
4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah tahun 2015-2017?
5. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara *CAR (Capital Adequacy Ratio)* terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah tahun 2015-2017?

1.4 Tujuan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh antara Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh antara Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh antara Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh antara Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh antara *CAR (Capital Adequacy Ratio)* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep Tata Kelola Perusahaan dan diharapkan pula dapat menjadi suatu bentuk informasi tambahan bagi perusahaan betapa pentingnya implementasi Basel II terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan, khususnya bagi industri perbankan syariah.

2. Manfaat bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan tambahan informasi sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan perbankan syariah secara tepat dan menguntungkan di masa yang akan datang dengan melihat penerapan sistem Tata Kelola Usaha dan Basel II.

3. Manfaat bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk bahan perkuliahan dan sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi mengenai pengaruh penerapan sistem Tata Kelola Usaha dan Implementasi Basel II terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

4. Manfaat bagi Peneliti

Dengan melakukan Penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh penerapan sistem Tata Kelola Usaha dan Implementasi Basel II terhadap kinerja keuangan perbankan khususnya perbankan syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variable dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran serta bangunan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai ruang sumber data penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variable penelitian dan definisi operasional variable metode analisis data, dan hipotesis penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ke empat berisi penjelasan setelah diadakan penelitian mencakup deskripsi

objek penelitian, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari rumusan permasalahan penelitian yang telah dibahas sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Grand Theory*

Grand theory adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Pada dasarnya berlawanan dengan empirisme, positivisme atau pandangan bahwa pengertian hanya mungkin dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta, masyarakat dan fenomena. (*Quentin Skinner, ed., The Return of Grand Theory in the Human Sciences, Cambridge, 1985*).

Agency Theory

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep Tata Kelola Usaha. Teori agen ini dikembangkan oleh Michael Johnson, yang memandang bahwa manajemen perusahaan (*agents*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Menurut Meisser, et al., (2006:7) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu :

- a. Terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik;
- b. Terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidak samaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Teori agen dipandang lebih luas karena dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai Tata Kelola Usaha berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999). Teori keagenan muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Seorang manajer (*agent*) akan lebih mengetahui mengenai

keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik (*principal*). Manajer (*agent*) berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik (*principal*). Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di perusahaan. Konflik kepentingan antar manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) akan menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk *bonding expenditures* yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Selain *agency cost*, konflik yang terjadi antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) juga dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Teori agensi juga menjelaskan tentang timbulnya manajemen laba yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan pasti terdapat seorang manajer dan seorang pemilik. Dan dalam hal ini, seorang manajer mempunyai tanggung jawab lebih banyak terhadap perusahaan tersebut. Manajer harus dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik. Dengan adanya tanggung jawab yang besar tersebut, manajer pasti akan menginginkan adanya imbalan yang besar. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda. Yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan tersebut dan kepentingan bagaimana dengan memegang tanggung jawab yang besar, maka akan mendapatkan imbalan yang besar juga, yaitu kepentingan untuk pribadinya sendiri. Menurut Eisenhardt (1989) bahwa ada teori *agency* menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004), untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang telah dicapai dalam mengelola tanggung jawab dari sebuah perusahaan. Tujuan utama dengan adanya teori *agency* menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Teori agen juga berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda, dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola suatu perusahaan.

2.2 Kinerja Keuangan Syariah

Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber – sumber daya yang dimiliki (Helfert, 1996 dalam Nuswandari, 2009).

Kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sucipto (2003) mengatakan pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengukuran kinerja secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran non-finansial dan finansial. Kinerja non-finansial adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan informasi-informasi non-finansial yang lebih dititikberatkan dari segi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan pengukuran kinerja secara finansial adalah penggunaan informasi-informasi keuangan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. Yang lazim digunakan dalam informasi keuangan adalah laporan rugi laba dan neraca (Purwaningtyas, 2011).

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank. Dalam tulisan Nur Hisamuddin dan M. Yayang Tirta K (2010) menjelaskan, pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap *stakeholders* bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya akan naik. Kenaikan nilai saham merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan (Ahmad Noor Fauzi, 2016).

Kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall ialah melalui angka hasil pengukuran Rasio Tingkat Pengembalian Modal atau *Return On Asset* (ROA) (Kasmir,2008) . Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa *Return On Asset*

merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah. *Return on asset* (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kegiatan fungsi bank. Sedangkan rasio profitabilitas adalah pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Semakin kecil rasio maka mengidentifikasi kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Toto pribadi menjelaskan rasio profitabilitas sebagai penilaian atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam perhitungannya dikaitkan dengan penjualan, aset atau modal (Pribadi: 2012). Kasmir juga yang menjelaskan bahwa rasio profit mampu memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dengan menilai tingkat laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi jadi, rasio profitabilitas ini dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.

Rasio profitabilitas memiliki fungsi khusus baik bagi perusahaan secara internal maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan. Rasio profitabilitas di antaranya adalah *Return On Asset* (ROA), *Return on asset* (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total

aktiva yang ada setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang di miliki perusahaan (Bambang, 1997).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Maka dari itu, profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kegiatan fungsi bank. Sedangkan rasio profitabilitas adalah pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Rasio ini terdiri atas rasio seberapa tingkat pengembalian dari aset yang di miliki perusahaan atau disebut juga dengan *Return On Asset* (ROA).

Tata kelola usaha dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan maupun investor dan *stakeholder* lainnya, yaitu tata kelola usaha yang diterapkan dengan baik dan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan nilai suatu perusahaan dalam jangka panjang. Salah satu prinsipnya ialah bersifat terbuka (*transparency*) dimana para pengguna dana bank harus melaporkan laba yang diperoleh dengan jujur dan terbuka kepada pihak bank karena banyaknya pengusaha yang berusaha untuk mendapatkan dana dari bank. Hanya jujur dan efisienlah yang dapat memperoleh pembiayaan dari bank. Jika bank mensyaratkan kejujuran dan efisiensi bagi pengguna dananya, semua investor juga memperoleh hasil yang lebih baik. Hal ini tentunya bisa meningkatkan kepercayaan investor dan dalam kondisi pasar yang sehat, bisa mendorong investasi.

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan pengembangan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka

meningkatkan taraf hidup masyarakat (Chapra, Ahmed, 2008 dalam Achmad Noor Fauzi, 2016).

2.3 Tata Kelola Usaha

Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Definisi Tata Kelola Usaha menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

Menurut Komite Cadbury, tata kelola usaha adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Terwujudnya tata kelola perusahaan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses bisnis. Salah satu faktor ketidak efektifan tata kelola untuk melindungi *stakeholder* yaitu lembaga keuangan atau bank yang tidak luput dari potensi kerugian.

Dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola usaha merupakan :

- a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para stakeholder lainnya.
- b. Suatu sistem Check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.

- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Usaha

Menurut YYPMI (2002, p.21), prinsip sistem Tata Kelola Usaha adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak- hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Menurut Supriyatno (2000, p.17), *The Indonesian Institute For Corporate Governance* mendefinisikan Tata Kelola Usaha sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stockholders* yang lain. Zarkasyi (2008:39-41) menjelaskan setiap industri perbankan harus memastikan penerapan asas Tata Kelola Usaha, asas tersebut diperlukan untuk mencapai kinerja yang baik dan berkesinambungan. Adapun lima asas Tata Kelola Usaha yang dibangun oleh OECD 2004 dan PBI No.8/4/2006 yaitu:

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi menuntut perusahaan secara jujur dan relevan juga wajib memberi informasi yang mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas merujuk kepada pihak yang diberi amanah dalam mengendalikan perusahaan di mana bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

3. **Responsibility (*Responsibility*)**

Dalam menjalankan tugas, partisipan harus mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

4. Independensi (*Independency*)

Dalam konteks Tata Kelola Usaha, independensi dimaksudkan membebaskan diri dari kepentingan pihak- pihak yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan menghindari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus memperlakukan pihak- pihak lain secara adil sesuai dengan ketentuan. Artinya, bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun, bank juga perlu memberi kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah.

Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Terdapat beberapa prinsip Islam yang mendukung Tata Kelola Usaha bagi keterlaksanaan tata kelola di dunia perbankan. Prinsip tersebut merupakan bagian sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan makro.

Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integrasi tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi sebagai berikut (Rukmana, 2010):

1. *Shiddiq*

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bahwa pengelolaan bank syariah dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan

mengedepankan cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).

2. *Tabligh*

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

3. *Amanah*

Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*). Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut prinsip syariah dijelaskan sebagai kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak.

4. *Fathanah*

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termaksud didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Dalam perpektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kaidah zakat, yaitu mengondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
- b. Kaidah pelarangan *riba*, yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang *riba*. Diharapkan produk-produk non *riba* ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap berani menghadapi resiko.
- c. Kaidah pelarangan judi atau *maisir*, tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.
- d. Kaidah pelarangan *gharar* (*uncertainty*), yaitu mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Perspektif tersebut mencerminkan nilai-nilai dan karakteristik yang khas pada bank syariah. Ciri - ciri yang terdapat dalam bank syariah adalah sebagai berikut (Warkum Sumitro) :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku (tidak rigid) dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.

2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan karena persentase bersifat melekat pada sisa utang, meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Sistem persentase memungkinkan bebas bunga semakin tinggi apabila nasabah terlambat membayar beban bunga tersebut.
3. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek (*project financing*), bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang diterapkan di muka.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau gabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*), sedangkan bagi bank syariah dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Proyek-proyek yang di biayai tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
5. Bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama. Mata uang yang sama tidak dapat dipakai sebagai barang (komoditi). Oleh karena itu, bank syariah dalam memberikan pinjaman tidak dalam bentuk tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang.
6. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank syariah dari sudut syariahnya. Dengan demikian, pelaksanaan prinsip Tata Kelola Usaha dalam perbankan syariah harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada dan juga harus mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah sehingga pada akhirnya didapatkan tata kelola bank yang selain dapat memberikan keuntungan bagi para *stakeholder*, juga dapat berjalan di atas rel/ koridor syariah (Rukmana, 2010).

Manfaat Sistem Tata Kelola Usaha

Menurut Forum *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan tata kelola usaha yang baik, antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan

- serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
 - c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
 - d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*.

Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dalam Sari dalam Nur Hisamuddin 2010, tujuan dan manfaat tata kelola usaha antara lain sebagai berikut :

- a. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
- b. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
- c. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
- d. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris. Direksi dan RUPS.
- e. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menjaga *Going Concern* perusahaan.

Mekanisme Tata Kelola Usaha

Tata kelola usaha dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan maupun investor dan *stakeholder* lainnya. Kontribusi positif yang dimaksud yaitu tata kelola usaha yang diterapkan dengan baik dan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan nilai suatu perusahaan dalam jangka panjang. Tata kelola usaha salah satu prinsipnya bersifat terbuka (*transparency*) dimana para pengguna dana bank

harus melaporkan laba yang diperoleh dengan jujur dan terbuka kepada pihak bank. Hal ini, karena banyaknya pengusaha yang berusaha untuk mendapatkan dana dari bank. Hanya jujur dan efisienlah yang dapat memperoleh pembiayaan dari bank. Jika bank mensyaratkan kejujuran dan efisiensi bagi pengguna dananya, semua investor juga memperoleh hasil yang lebih baik. Hal ini tentunya bisa meningkatkan kepercayaan investor dan dalam kondisi pasar yang sehat, bisa mendorong investasi.

Dalam mekanisme tata kelola usaha, dua partisipan prinsipal dan agen menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya, maka muncul lah mekanisme sistem tata kelola usaha.

Mekanisme tata kelola perusahaan akan mampu mengurangi perampasan sumber daya bank dan mempromosikan efisiensi bank. Ini adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan perbankan. (Caprio, et al. dalam Nur Hisamuddin, 2010).

Tata kelola usaha biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan pengendalian dari mekanisme pasar (Larcker et. al. dalam Wardhani, 2006).

Sukses tidaknya perusahaan akan sangat ditentukan oleh keputusan atau strategi yang diambil perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep *twotier*, dimana dewan terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (Wardhani, 2006).

Selain itu, bank umum syariah perlu untuk membentuk dewan pengawas syariah dalam rangka memurnikan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan ketentuan syariah (Chapra dan Ahmed, 2008). Sehingga mekanisme tata kelola usaha yang menjadi indikator dari sistem tata kelola usaha

yang baik dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan ukuran dewan pengawas syariah.

1. Pengertian Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisari dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut (Muhamd Arif, 2016).

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Umumnya dewan komisaris memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT.
2. Dewan direksi berdasarkan kepada kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT dalam melaksanakan tugasnya.
3. Dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu. Ini merupakan kewenangan khusus dewan komisaris.

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993).

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan adanya *agency problem* (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack 1996, Jensen 1993).

Terkait dengan manajemen laba, ukuran dewan komisaris dapat memberikan efek yang berkebalikan dengan efek terhadap kinerja. Hal ini bisa diketahui dengan pernyataan dari Scott (2002) bahwa melakukan manajemen laba dapat dilaksanakan dengan berbagai cara salah satunya dengan menurunkan laba. Untuk itu hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba positif, makin banyak anggota dewan komisaris maka makin banyak manajemen laba yang terjadi. Tetapi ada beberapa peneliti yang menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris dan manajemen laba berpengaruh negative.

Peneliti tersebut diantara adalah Yu (2006) dan Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001), yang menyakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negative secara signifikan terhadap manajemen laba, yaitu bahwa menandakan makin sedikit dewan komisaris maka tindakan manajemen laba makin banyak, karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Tetapi penelitian tersebut hanya terjadi pada kasus manajemen laba dengan menggunakan penurunan laba. Dan kasus ini ternyata kurang signifikan dalam beberapa kasus.

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz, Schmid dan Zimmermann (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner et al. (2003) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting. Mereka juga menyarankan bahwa dewan komisaris yang berukuran besar akan kurang efektif dari pada dewan yang ukurannya kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Yermack (1996), Beasley (1996) dan Jensen (1993) juga menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris yang berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

2. Pengertian Dewan Direksi

Menurut Media BPR (2009), dewan direksi (*board of directors*) adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan. Sedangkan *Board size* atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan. Ukuran dewan direksi, diukur dengan banyaknya jumlah anggota dewan direksi yang ada di dalam perusahaan (Suranta dan Machfoedz, dalam Purwaningtyas, 2011).

Pengaturan terhadap direktur di Indonesia terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Umumnya dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang saham sebagai principal dengan manajer sebagai agennya, maka manajer pada akhirnya akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal bagaimana mereka mengalokasikan dana investor (Jensen & Meckling, 1976 ; Shleifer & Vishny, 1997). Selain itu Mizruchi (1983) dalam Midiastuti dan Mackfudz (2003) juga menjelaskan bahwa dewan merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang (Louden, 1982 dalam Midiastuti dan Mackfudz 2003).

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan baru, berapa banyak dewan yang

dibutuhkan perusahaan? apakah dengan semakin banyak dewan berarti perusahaan dapat meminimalisasi agensi antara pemegang saham dengan direksi? Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang resources dependen (Alexander, Fernell, Halporn, 1993 ; Doodstein, Gautarn, Boeker, 1994 ; Mintzberg, 1983).

Maksud dari pandangan resources dependen adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Pfeffer & Salancik (1978) dalam Bugshan (2005) juga menjelaskan bahwa dengan semakin besar kebutuhan akan menghubungkan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal yaitu : meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan control (Jensen, 1993 ; Yermack, 1996).

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan direksi lebih sedikit (Jensen, 1993 ; Lipton dan Lorsch, 1992 ; Yermack, 1996). Dalton et al (1999) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg et al (1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negative antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, dengan menggunakan sampel perusahaan di Finlandia. Jadi, dewan merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam *corporate governance*, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan (Ahmad Noor Fauzi, 2016).

Bukti yang menyatakan efektifitas ukuran dewan masih berbaur. Dari hasil yang masih belum konklusif tersebut dapat dikatakan bahwa pengaruh ukuran direksi terhadap kinerja perusahaan akan tergantung dari karakteristik dari masing-

masing perusahaan terkait. Kaitan tersebut terutama dengan karakteristik perusahaan secara keuangan. Efektifitas direksi dalam menghasilkan kinerja akan berbeda bagi perusahaan yang sehat secara keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang sedang dalam masalah keuangan.

Mengingat fungsi yang berbeda antara dewan direksi dengan dewan komisaris, maka penelitian ini membagi ukuran dewan ini menjadi ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris. Kebutuhan akan jumlah dewan direksi dengan dewan komisaris dalam perusahaan yang sedang mengalami tekanan keuangan dengan perusahaan yang sehat secara keuangan akan sangat berbeda.

3. Pengertian Komite Audit

Keberadaan komite Audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik, adapun yang membentuk Komite Audit adalah Komite Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengelolaan perusahaan (Effendi, 2007). Komite audit di Indonesia masih merupakan hal yang relatif baru karena perkembangan Komite Audit di Indonesia sangat terlambat dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut antara lain disebabkan pemerintah baru saja menetapkan kebijakan tentang pemberlakuan Komite Audit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu pada tahun 1999, Selain itu anjuran dari Bapepam kepada perusahaan yang telah go publik agar memiliki Komite Audit baru ditetapkan pada tahun 2000. Keberadaan Komite Audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan sangat diperlukan terutama dari aspek pengendalian, maka Komite Audit perlu mendapatkan perhatian dari manajemen dan Dewan Komisaris serta pihak-pihak terkait yang bertindak sebagai regulator seperti Menteri keuangan, Menteri BUMN, Bapepam dan Bursa Efek Indonesia (Ahmad Noor Fauzi, 2016).

Perkembangan praktek Komite Audit di Indonesia dapat dibedakan atas 3 (tiga) hal sesuai dengan jenis atau karakteristik perusahaan yang ada seperti Perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Perusahaan Publik, antara lain adalah: Komite Audit di Perbankan Indonesia, Komite Audit yang diwajibkan

(diberlakukan) dikalangan perbankan dinamakan Dewan Audit atau Badan Audit. Dewan Audit diatur berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR/1995 tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/8/UPPB/1995 tanggal 31 Maret 1995 Menurut ketentuan tersebut, Dewan Audit dalam perbankan memiliki 6 (enam) tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyetujui Internal Audit.
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal audit dan tidak menindaklanjuti laporan Kepala SKAI.
3. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta Instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
4. Memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sama dengan standar auditing yang berlaku.
5. Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai prinsip pengelolaan bank secara sehat.
6. Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI Seperti halnya komite audit di perusahaan.

Dewan komisaris membutuhkan komite audit untuk membantu melakukan pengawasan dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit bertanggungjawab mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit juga menghubungkan para pemegang saham dan komisaris dengan manajemen dalam usaha menangani pengendalian. Paling tidak terdapat satu anggota komisaris independen sebagai ketua komite audit, dan dua orang dari luar perusahaan sebagai anggota komite audit. Komite audit dalam suatu perusahaan dapat diukur dari jumlah anggota komite audit (Oemar, 2014:386).

4. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Khusus bagi bank syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki dewan pengawas syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank

syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam (Ahmad Noor Fauzi, 2016).

DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha, serta ahli dan praktisi ekonomi). DSN MUI mempunyai fungsi melaksanakan tugas- tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah- masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah DSN adalah singkatan dari dewan syariah nasional. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip- prinsip hukum islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk menjadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah (Soemitra, 2009).

Struktur organisasi DSN terdiri dari pengurus pleno (56 anggota) dan badan pelaksanaan harian (17 orang anggota). Ketua DSN MUI dijabat Ex Officio ketua umum MUI dan sekretaris DSN MUI dijabat Ex Officio sekretaris umum MUI. Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, komisaris fatwa MUI, ormas islam, perguruan tinggi islam, pesantren dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh badan pelaksana harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh rapat pleno DSN MUI. Tercatat sampai dengan juli 2008 DSN MUI telah mengeluarkan 61 fatwa (Ahmad Noor Fauzi, 2016).

Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dibentuklah dewan pengawas syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal- hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Dewan pengawas syariah ini secara organisasi bertanggung

jawab kepada DSN MUI pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral bertanggung jawab kepada Allah SWT (Soemitra, 2009).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Menurut Chtourou, dkk (2001) dalam Dewayanto (2010) menyatakan bahwa jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat mengurangi profitabilitas. Dengan demikian, profitabilitas bank akan meningkat (Ahmad Noor Fauzi, 2016).

2.4 Basel II (*Basel Capital Accord*)

Komite Basel untuk pertama kalinya menetapkan metodologi yang dibakukan dalam penghitungan besarnya “modal berdasarkan risiko” dari suatu bank yang perlu diperhitungkan. Kesepakatan Basel I mencakup risiko kredit (*credit risk*). Modal yang harus disediakan dikaitkan dengan risiko kredit, modal yang dikaitkan dengan risiko kredit sesuai dengan perkembangan dan pertimbangan pemikiran pada kesepakatan pertama dibuat.

Basel II adalah yang kedua dari *Basel Accord*, yang rekomendasi mengenai hukum perbankan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan. Basel II, awalnya diterbitkan pada bulan Juni 2004, dimaksudkan untuk menciptakan sebuah standar internasional untuk regulator perbankan untuk mengontrol berapa banyak kebutuhan modal bank-bank untuk menyisihkan untuk menjaga terhadap jenis bank risiko keuangan dan operasional (dan ekonomi keseluruhan) wajah. Salah satu fokus basel adalah untuk menjaga konsistensi peraturan yang cukup sehingga hal ini tidak menjadi sumber ketidaksetaraan antara bank-bank internasional yang kompetitif aktif. Advokat Basel II percaya bahwa standar internasional seperti dapat membantu melindungi system

keuangan internasional dari jenis masalah yang mungkin timbul harus sebuah bank besar atau serangkaian keruntuhan bank.

Basel II merupakan suatu kebijakan di bidang perbankan. Sesuai dengan pengertian kebijakan (*policy*) dalam Kamus Akuntansi karangan Sujana Ismaya,S.E., Kebijakan adalah sikap pelaksanaan suatu pernyataan cita- cita, tujuan, prinsip, atau suatu maksud yang dianggap sebagai garis pedoman bertindak dalam usaha mencapai sasaran dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam teorinya, Basel II berupaya mencapai hal ini dengan mendirikan risiko dan persyaratan pengelolaan modal yang dirancang untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang memadai untuk resiko bank menghadapkan sendiri untuk melalui pemberian pinjaman dan praktek investasi. Secara umum, aturan ini berarti risikonya lebih besar untuk bank mana yang terkena, semakin besar jumlah modal bank perlu terus untuk menjaga solvabilitas dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Terdapat konsep tiga pilar yang dirancang didalam Basel yaitu:

1. Pilar 1 – *Minimum capital requirements*.

Kewajiban penyediaan modal minimum (*Minimum capital requirements*) yang memperbaiki dan memperluas aturan standar yang telah dibuat pada kesepakatan tahun 1988 yaitu dengan menggunakan perhitungan rasio CAR (*Capital Adequaty Ratio*).

2. Pilar 2 – *Supervisory Review*.

Proses *supervisory review* dalam pilar 2 diperuntukan mengoptimalkan praktek yang telah ada. Secara implisit konsep ini sudah ada pada Basel I untuk menetapkan standar minimum yang dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi bank. Pilar 2 digunakan oleh *Federal Reserve Board* di AS dan *Financial Authority Services Authority* di Inggris sebagai pendekatan *supervisory review* yang menyerupai pendekatan pengawasan bank berbasis risiko yang. Fokus dari *supervisory review* adalah:

- a. Menjamin tersedianya modal diatas yang ditetapkan dalam Pilar I.

- b. Melakukan intervensi secara dini jika diperlukan untuk mengantisipasi terhadap risiko yang akan muncul, sehingga modal tidak turun dibawah yang disyaratkan.

Pilar 2 juga meliputi evaluasi risiko suku bunga jenis tertentu dalam *banking book* sebagaimana dokumen *Basel Committee "Principles for the management and supervision of interest rate risk"* yang menjelaskan cara mengelola tingkat suku bunga di dalam *banking book*.

3. Pilar 3 – *Disclosure*

Pilar 3 adalah pilar disiplin pasar yang didefinisikan sebagai mekanisme *governance* internal dan eksternal dalam perekonomian pasar uang tanpa adanya intervensi pemerintah secara langsung. Pilar ini mencakup hal-hal yang akan dibutuhkan dalam pengungkapan publik oleh bank serta dirancang untuk membantu pemegang saham bank dan analis pasar dan selanjutnya akan meningkatkan transparansi atas permasalahan seperti portofolio aktiva bank dan profil risikonya.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Jafra dan Manavi (2011) bank syariah lebih baik di sisi *Capital Adequacy* (rasio kecukupan modal) karena bank syariah telah menempati posisi yang lebih aman dan menurunkan resiko dengan pembiayaan aset dan operasi mereka melalui meningkatkan ekuitas dari pada utang.

Pernyataan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank tersebut. CAR juga menggambarkan kondisi perbankan di antaranya:

1. Indikasi permodalan apakah telah memadai (*adequate*) untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif karena setiap kerugian akan mengurangi modal. CAR mengukur kemampuan permodalan bank dalam mengantisipasi penurunan aktiva dan menutup kemungkinan terjadinya kerugian dalam pembiayaan. CAR yang tidak

mencerminkan semakin baiknya permodalan karena modal dapat digunakan untuk menjamin pemberian pembiayaan. CAR yang rendah mencerminkan bahwa permodalan bank kurang baik karena bank kurang mampu menutup kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pembiayaan.

2. Kemampuan membiayai operasional dan membiayai seluruh aktiva tetap dan investasi bank. CAR yang tinggi menunjukkan cukupnya modal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat melakukan pengembangan bisnis serta ekspansi usaha dengan lebih aman.
3. Kemampuan bank dalam meningkatkan rentabilitas. CAR yang tinggi menunjukkan bank tersebut memiliki tingkat modal yang cukup besar dalam meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan untuk memperluas pembiayaannya, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar bagi bank untuk meningkatkan rentabilitasnya.
4. Ketahanan dan efisiensi perbankan. Bila CAR rendah, kemampuan bank untuk survive pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri cepat habis untuk menutupi kerugian yang dialami dan akhirnya kelangsungan usaha bank menjadi terganggu.

Setelah menelaah pembahasan diatas, Untuk mengukur pengimplementasian Basel II didalam penelitian ini sesuai dengan kriteria prinsip 3 pilar dalam Perbankan Syariah adalah menggunakan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Standar Bank Indonesia untuk rasio ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi guna mendukung materi yang akan di bahas. Ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang Pengaruh Tata Kelola

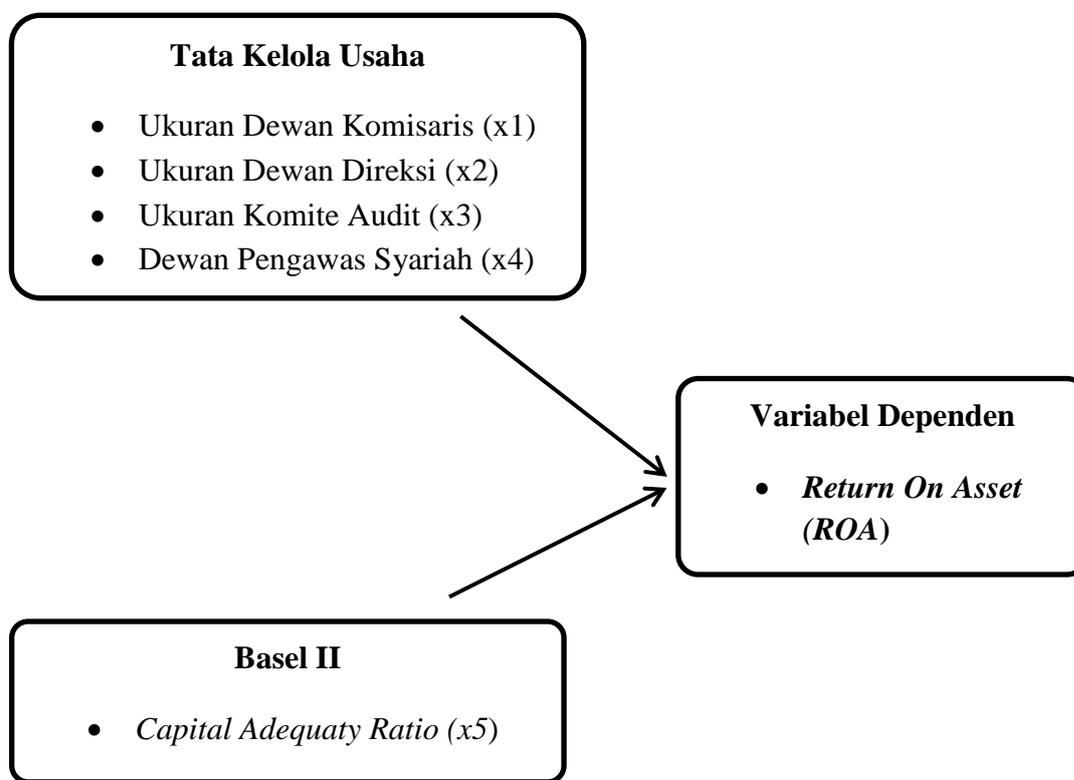
Perusahaan dan Implementasi Basel II Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.
Diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1	Achmad Noor Fauzi Institut Agama Islam Negeri Surakarta	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2011-2015)	Hasil penelitian: Terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah terhadap <i>ROA</i> pada Bank Umum Syariah.
2	I Gusti Bagus Wira Aryawan (2009) Skripsi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Gunadarma,	Pengaruh implementasi Basel II Terhadap Kinerja Keuangan Bank Di Indonesia	Dari hasil uji Independent Sample t-Test dapat disimpulkan bahwa bank yang memiliki perbedaan yang signifikan terbesar pada periode tahun 2007-2008 (periode sebelum dan sesudah implementasi Basel II di Indonesia)
3	Eko Sunarwan	Pengaruh <i>Good</i>	Hasi uji analisis :

	(2015) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	<i>Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah</i>	Dewan Komisaris berpengaruh signifikan, Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan, Dewan Komisaris Independen tidak berpegaruh signifikan, Komite Audit tidak bepengaruh signifikan, Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan
4.	Arry Eksandy (Jurnal Akuntansi, Vol 5 No. 1, Januari 2018) Universitas Muhammadiyah Tangerang	<i>Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari'ah Indonesia</i>	Hasil penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
5.	Nur Hisamuddin Akuntansi Fakultas Ekonomi Univ. Jember & M. Yayang Tirta K Fakultas Ekonomi Univ. Jember	<i>Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah</i>	Hasil penelitian: menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE.

2.6 Kerangka Pemikiran



2.7 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, hipotesis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

2.7.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Ukuran Dewan Komisaris menentukan tingkat keefektifan pemantauan kinerja keuangan perusahaan. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin

buruk kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993).

Chtourou et al (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan jumlah anggota dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Maka dari itu, semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin besar pula kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian Achmad Noor Fauzi (2016) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Artinya jumlah dewan komisaris yang lebih banyak akan lebih efektif dalam pengawasan pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis penelitian yaitu:

H_{a1} = Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

2.7.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi mempunyai kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan. Semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap perusahaan yang lebih baik, dengan keadaan perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik (Isshaaq, 2009).

Dalton et al (dalam Hardikasi, 2011) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, hipotesis penelitian yaitu:

H_{a2} = Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

2.7.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

Komite Audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari tata kelola usaha di perusahaan-perusahaan. Dengan demikian, adanya komite audit maka kinerja perusahaan akan semakin terkontrol dan terkendali dalam menjalankan tugasnya.

Menurut BAPEPAM dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur mengenai independensi Komite Audit. Independensi Komite Audit menjadikan Komite Audit memiliki kemandirian dalam menyampaikan sikap dan pendapat. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Semakin banyaknya anggota independen dalam komite audit, maka penilaian komite audit terhadap pelaporan kinerja akan semakin objektif dan andal (Trihartati, 2010).

Nurul Rifa Yuliani (2018) dalam penelitiannya menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga, hipotesis penelitian yaitu:

H_{a3} = Ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

2.7.4 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, kedudukan Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Menurut Faozan (2013) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen.

Semakin besar jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat mengurangi profitabilitas (Chtourou, 2001).

Hasil penelitian milik Eko Sunarwan (2016) menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, hipotesis penelitian yaitu:

H_{a4} = Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

2.7.5 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Semakin besar CAR, maka semakin baik bank tersebut. CAR yang semakin besar mengindikasikan bahwa permodalan bank semakin kuat. Atau dengan kata lain bank memiliki kecukupan modal yang baik.

Eko, 2015 mengatakan bahwa semakin besar rasio kecukupan modal maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank tersebut.

Dalam penelitian Ulfah Muharramah (2017) menyebutkan bahwa ada hubungan antara rasio CAR terhadap kinerja keuangan perbankan. Sehingga berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, hipotesis penelitian yaitu:

H_{a5} = CAR berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

3.1.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data tersebut dapat diperoleh dari lembaga atau keterangan serta melalui studi pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi dan dianalisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dokumenter berupa Laporan Tahunan dan Laporan Tata Kelola Usaha Bank Umum Syariah di Indonesia yang diperoleh dari website resmi bank-bank tersebut dari tahun 2015-2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data *time series dan cross section* dari tahun 2015 sampai 2017 yang dipandang cukup mewakili kondisi perbankan syariah di Indonesia dan indikator-indikator keuangan perbankan syariah pada periode itu.

3.1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan tata kelola usaha dan implementasi basel II terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah. Penerapan tata kelola usaha dan implementasi basel II dalam penelitian ini berfungsi sebagai pemediasi pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pada perbankan. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Jadi variabel ini bersifat menerangkan dan mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem tata kelola usaha perbankan syariah dan basel II.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah metode dokumentasi. Dalam melaksanakan metode tersebut, penulis mengambil data berdasarkan dokumen-

dokumen seperti buku, jurnal referensi, peraturan-peraturan serta laporan keuangan yang telah di publikasikan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Peneliti memperoleh data-data yang bersumber dari:

1. Penelitian pustaka (*library research*)

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, tesis, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan dan laporan Tata Kelola Usaha Bank Umum Syariah selama periode tahun 2015-2017 yang bisa dilihat dari situs masing-masing perusahaan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah suatu keseluruhan dari objek atau individu yang merupakan sasaran penelitian (Sudarmanto, 2013:26). Populasi merupakan kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi tidak dapat dibedakan satu sama lain (Sugiyono, 2012:61). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2017. Digunakan Bank Umum Syariah sebagai sampel karena Bank Umum Syariah berdiri sendiri bukan merupakan unit kerja dari Bank Konvensional seperti Unit Usaha Syariah. Selain itu, Bank Umum Syariah telah dianggap bank yang murni menggunakan transaksi berprinsip syariah oleh Bank Indonesia.

3.3.2 Sampel

Sample adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, sample dipilih untuk mewakili penelitian dari seluruh jumlah populasi. Maka dari itu, sample yang baik adalah sample yang dapat mewakili seluruh karakteristik populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria berikut:

1. Bank Umum Syariah yang telah berdiri sendiri (bukan Unit Usaha Syariah) periode 2015-2017.
2. Bank tersebut menerapkan sistem Tata Kelola Usaha dan mempublikasikan laporan GCG dalam *Annual Report*-nya selama periode 2015 s/d 2017.
3. Data tersedia lengkap (data mengenai tata kelola usaha perusahaan maupun data untuk kinerja keuangan perbankan syariah).

Berdasarkan kriteria di atas, dari 13 Bank Umum Syariah hanya 12 bus yang ditemukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria dan memiliki data laporan yang lengkap dari tahun 2015-2017, diantaranya adalah Bank Bukopin Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Maybank Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bank BTPN Syariah.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerapan Tata Kelola Usaha dan Basel II terhadap Kinerja Keuangan pada perbankan syariah. Penerapan Tata Kelola Usaha dan Basel II dalam penelitian ini berfungsi sebagai pemediasi pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian empiris yaitu untuk menguji hipotesis yang diajukan. Variabel dependen adalah variabel yang tidak bisa berdiri sendiri, dalam penelitian ini variabel dependen dan independennya ialah sebagai berikut.

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental Bank Umum Syariah. Data yang berasal dari Laporan Keuangan BUS dapat diukur dengan

menggunakan ROA yang dihitung dari laba bersih sesudah pajak dibagi dengan total aktiva.

Standar Bank Indonesia untuk rasio ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 adalah 0,5%-1,25%. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun secara negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini berupa:

3.4.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan pengarahan kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris tersebut (KNKG, 2004). Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan paling kurang 3 orang. Dan paling banyak sama dengan jumlah anggota dewan direksi.

3.4.2.2 Ukuran Dewan Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan, tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan secara efektif serta bertindak independen. Ukuran dewan direksi diukur dengan menggunakan jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan paling kurang 3 orang.

3.4.2.3 Ukuran Komite Audit

Komite Audit bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola Usaha. Dewan komisaris telah membentuk komite- komite yaitu komite audit, komite pemantau resiko dan komite remunerasi dan nominal (KRN), diukur dengan mengetahui berapa jumlah anggota komite- komite dalam suatu bank. Semakin banyaknya anggota independen dalam komite audit, maka penilaian komite audit terhadap pelaporan kinerja manajemen akan semakin objektif dan andal.

3.4.2.4 Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki dewan pengawas syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam, diukur dengan mengetahui berapa jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu bank.

3.4.2.5 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Jafra dan Manavi (2011) bank syariah lebih baik di sisi *Capital Adequacy* (rasio kecukupan modal) karena bank syariah telah menempati posisi yang lebih aman dan menurunkan resiko dengan pembiayaan aset dan operasi mereka melalui meningkatkan ekuitas dari pada utang. Standar Bank Indonesia untuk rasio ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linier berganda. Selain itu, uji deskriptif juga digunakan untuk memberikan berupa gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini dan pengujian kelayakan model regresi dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dengan program SPSS V.20 dan kemudian penelitian ini akan dianalisis dengan metode analisis sebagai berikut:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistika Deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sample atau populasi. Menurut Ghozali (2013) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis statistika deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel juga digunakan untuk memberikan gambaran dan karakteristik data dari sampel yang digunakan.

3.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji Asumsi Klasik)

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dipakai baik atau tidak dan apakah data layak untuk dianalisis. Uji asumsi klasik digunakan dalam model regresi untuk memberikan hasil yang menghindari terjadinya estimasi yang bias. Terdapat 4 cara untuk melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2013) uji normalitas adalah model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam pengujian normalitas ini dilakukan dengan One Sample Kolmogorov Smirnov dengan tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan One-Sample Kolmogorov Smirnov, yaitu:

- a. Jika Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b. Jika Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinieritas (tidak terjadi korelasi diantara variabel independen). Dalam penelitian multikolinieritas diuji dengan perhitungan *tolerance value* dan *variance inflation factor (VIF)*. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah:

- a. Jika *tolerance value* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas.
- b. Jika *tolerance value* $< 0,10$ dan $VIF < 10$, maka terjadi multikolinieritas.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2013). Uji autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Untuk melakukan pengujian ada tidaknya masalah

autokorelasi, penulis menguji dengan hipotesis uji Durbin Watson adalah sebagai berikut :

- H_0 = tidak terjadi autokorelasi.
- H_1 = terjadi autokorelasi

Uji Durbin Watson dihitung terlebih dahulu, kemudian dibandingkan dengan nilai batas atas (d_U) dan nilai batas bawah (d_L) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. $d_W > d_U$ tidak terdapat autokorelasi positif
- b. $d_L < d_W < d_U$, tidak dapat disimpulkan
- c. $d_W < 4 - d_U$, tidak terjadi autokorelasi
- d. $4 - d_U < 4 - d_L$, tidak dapat disimpulkan
- e. $d_W > 4 - d_L$, ada autokorelasi negatif
- f. $d_U < d_W < 4 - d_U$, tidak ada autokorelasi positif dan negative

Uji Autokorelasi juga dapat dilakukan melalui *Run Test*. Uji ini merupakan bagian dari statistik *non-parametric* yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* uji *Run Test*. Apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Uji *run test* akan memberikan kesimpulan yang lebih pasti jika terjadi masalah pada Durbin Watson Test yaitu nilai d terletak antara d_L dan d_U atau diantara $(4 - d_U)$ dan $(4 - d_L)$ yang akan menyebabkan tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti atau pengujian tidak meyakinkan jika menggunakan DW test (Ghozali, 2013).

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Metode dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien korelasi Spearman, yaitu dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara *standardized predicted value (ZPRED)* dengan *studentized residual (SRESID)*.

Ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya).

3.5.3 Analisis Regresi

Analisis regresi merupakan suatu alat statistik yang memberikan penjelasan mengenai pola hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang diukur menggunakan alat bantu dengan program SPSS. Analisis regresi berganda digunakan apabila pengguna menggunakan atau memasukan lebih dari satu variabel prediktor. Salah satu prosedur pendugaan model untuk regresi linier berganda adalah dengan prosedur *Least Square* (kuadrat terkecil). Konsep dari metode *Least Square* adalah menduga koefisien regresi (β) dengan meminimumkan kesalahan (*error*). Persamaan Regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$ROA_{t+1} = a + \beta_1 DK + \beta_2 DD + \beta_3 KA + \beta_4 DPS + \beta_5 CAR + e$$

Keterangan:

Y = *return of asset*

a = konstanta

DK = ukuran dewan komisaris

DD = ukuran dewan direksi

KA = ukuran komite audit

DPS = ukuran dewan pengawas syariah

CAR = ukuran CAR

e = kesalahan residual (*error*)

3.6 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai hubungan antara variabel independen (ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah dan CAR) dengan variabel dependen, kinerja keuangan sebagai proksi *Return On Asset*.

3.6.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013). Uji-F pada dasarnya menunjukkan semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Uji F (F test). Hasil F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan $\alpha = 5\%$ atau tingkat signifikan 0,05, jika :

1. $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.2 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Pengujian signifikansi parameter individual ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2013). Kriteria pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, yaitu dengan membandingkan t tabel dan t hitung dengan $\alpha = 5\%$ seperti berikut :

1. $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau nilai Sig $> 0,005$, maka H_0 ditolak.
2. $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau nilai Sig $< 0,005$, maka H_0 diterima.

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai Adjusted R Square menunjukkan proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Semakin tinggi nilai Adjusted R Square maka akan semakin baik bagi model regresi variabel terikat juga semakin besar. Apabila nilai R² besar atau mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen sehingga hasil regresi akan semakin baik. (Ghozali, 2013).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Deskripsi Data

Penelitian pada bab ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai pengaruh penerapan tata kelola usaha dan implemementasi basel II terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on assets*. Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20.

1.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi pada penilitan ini adalah Bank Umum Syariah Indonesia yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan OJK per-Desember 2017. Dari 13 lembaga keuangan yang termaksud dalam Bank Umum Syariah, Terdapat 12 lembaga keuangan yang sesuai denan kriteria. Berdasarkan metode *purposive sampling*, maka jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 perusahaan sampel. Periode pengamatan untuk pengujian hipotesis adalah tahun 2015-2017, sehingga pooled data untuk 3 periode sebesar 36 sampel (12x3). Adapun alasan digunakan periode 2015-2017 adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dari beberapa periode. Berikut prosedur pemilihan sampel yang digunakan dibawah ini :

Tabel 4.1 Proses Sampling

No.	Kriteria	Jumlah
1	Bank Umum Syariah yang telah berdiri sendiri (bukan Unit Usaha Syariah) periode 2015, 2016 dan 2017.	13
2	Bank tidak menerapkan sistem Tata Kelola Usaha dan tidak mempublikasikan laporan GCG dalam <i>Annual Report</i> -nya selama periode 2015 s/d 2017.	(0)
3	Data tidak tersedia lengkap (data mengenai Tata Kelola Usaha perusahaan maupun data untuk kinerja keuangan perbankan syariah).	(1)
4	Jumlah Bank Umum Syariah yang sesuai dengan kriteria sampel	12
	Total Observasi (12 X 3)	36

Sumber : Olah Data Sekunder

1.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 5 variabel. Variabel independen yaitu ukuran Dewan Komisaris (X1), ukuran dewan direksi (X2), ukuran komite audit (X3), ukuran dewan pengawas syariah (X4), CAR (X5) dan Variabel dependen yaitu ROA (Y). Dalam penelitian ini sampel dipilih menggunakan metode *puspositive sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah di tentukan.

1.2 Hasil Analisis Data

1.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Deskriptif statistik bertujuan memberikan gambaran data variabel-variabel penelitian mengenai nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi untuk 36 data pengamatan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah, dan rasio CAR. Berikut tabel yang disajikan hasil dari uji deskriptif :

Tabel 4.2
Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	36	3	6	3.75	.806
Dewan Direksi	36	3	8	4.39	1.225
Komite Audit	36	3	7	3.89	1.036
DPS	36	2	3	2.31	.467
CAR	36	11.51	36.70	18.9425	5.86201
ROA	36	-20.13	11.20	-.2217	5.37754
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa :

- Hasil ukuran dewan komisaris berkisar antara 3 sampai dengan 6 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,75 dan deviasi standar (*std. deviation*) sebesar 0,806.
- Ukuran dewan direksi berkisar antara 3 sampai dengan 8 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,39 dan deviasi standar (*std. deviation*) sebesar 1,225.
- Ukuran komite audit berkisar antara 3 sampai dengan 7 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,89 dan deviasi standar (*std. deviation*) sebesar 1,036.
- Ukuran dewan pengawas syariah berkisar antara 2 sampai dengan 3 dengan mean sebesar 2,31 dan deviasi standar (*std. deviation*) sebesar 0,467.
- Hasil uji data statistik deskriptif pada ukuran CAR berkisar antara 11,51 sampai dengan 36,70 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18.94 dan deviasi standar (*std. deviation*) sebesar 5.862.

- *Return On* sebesar *Asset* (Y) berkisar antara -20,13 sampai dengan 11.20 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar -0,2217 dan deviasi standar (*std. deviation*) sebesar 5,37754.

1.2.2 Uji Kelayakan Model

Uji asumsi klasik atau kelayakan model digunakan sebagai syarat statistik yang harus dipenuhi pada uji regresi linier berganda. Model regresi akan dinyatakan baik dan dapat dilakukan jika memenuhi uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskesastisitas.

1.2.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen dalam satu model regresi terdistribusi normal atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan uji statistika non-parametik kolmogorov-smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H₀ : data residual terdistribusi normal

H_a : data residual tidak terdistribusi normal

Apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka H₀ diterima sedangkan jika signifikasinya kurang dari 0,05 maka H₀ ditolak.

Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Uji Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4.13035842
	Absolute	.094
Most Extreme Differences	Positive	.067
	Negative	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z		.565
Asymp. Sig. (2-tailed)		.907

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Olah data sekunder

Dari tabel hasil uji diatas menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,565 dengan tingkat signifikan sebesar $0,907 > 0,05$. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa angka signifikan (Sig) untuk variabel dependen dan independen pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari tingkat alpha α yang ditetapkan yaitu 0,05 tingkat kepercayaan 95% yang berarti sampel terdistribusi secara normal.

1.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel independen atau variabel bebas (multikolinieritas) dapat diketahui atau dideteksi dengan memanfaatkan statistic korelasi *Variance Inflation Faktor* (VIF). Apabila harga koefisien VIF untuk masing-masing

variabel independen kurang dari 10 (*tolerance* > 0,10 dan *variance Inflation Factor* (VIF) < 10) maka variabel tersebut dinyatakan bebas dari gejala multikolinieritas (R. Gunawan Sudarmanto, 2013). Berikut ini tabel hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	- 18.566	6.472		- 2.869	.007		
Dewan Komisaris	1.027	1.251	.154	.821	.418	.559	1.789
Dewan Direksi	3.322	1.132	.757	2.935	.006	.295	3.384
Komite Audit	-1.838	1.181	-.354	- 1.556	.130	.380	2.634
DPS	-1.767	1.894	-.153	-.933	.358	.726	1.377
CAR	.588	.149	.641	3.946	.000	.746	1.340

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Olah data sekunder

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas diketahui bahwa nilai Ukuran Dewan Komisaris menunjukkan hasil perhitungan *tolerance* sebesar 0,59 dan nilai VIF sebesar 1,789. Nilai Ukuran Dewan Direksi sebesar 0,295 dan Nilai VIF sebesar 3,384. Nilai *tolerance* Ukuran Komite Audit 0,380 dan nilai VIF sebesar 2,634. Nilai *tolerance* Ukuran DPS 0,726 dan nilai VIF sebesar 1,377. Dan nilai *tolerance* CAR sebesar 0,746 dan nilai VIF sebesar 1,340. Dari hasil di atas diperoleh kesimpulan bahwa seluruh nilai VIF disemua variabel penelitian lebih

kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak terjadi masalah multikolinieritas diantara variabel independen dalam model regresi.

1.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Beberapa cara dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi salah satunya adalah Uji Durbin Watson. Hasil dari uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.640 ^a	.410	.312	4.46130	1.122

a. Predictors: (Constant), CAR, Komite Audit, DPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Olah data sekunder

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa pada penelitian ini memiliki 5 variabel bebas dan 1 variabel terikat dan memiliki jumlah sampel sebanyak 36, atas dasar hal tersebut maka diketahui nilai dL dan dU yang diperoleh dari tabel Durbin Watson sebesar 1,2358 dan 1,7245. Karena nilai dW berada pada kondisi $4 - dU < 4 - dL$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW berada pada daerah keragu-raguan.

Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi pada model regresi tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan uji tambahan, yaitu dengan melakukan Run Test. Run test digunakan

untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Adapun hasil output uji Run Test adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Run Tes

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.04939
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	14
Z	-1.522
Asymp. Sig. (2-tailed)	.128

a. Median

Pada output Runts Test di atas terlihat bahwa nilai test 0,04939 sedangkan nilai probabilitasnya adalah 0,128. Untuk menyimpulkan apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak maka nilai test dibandingkan dengan nilai tabel atau nilai probabilitas dibandingkan alphanya.

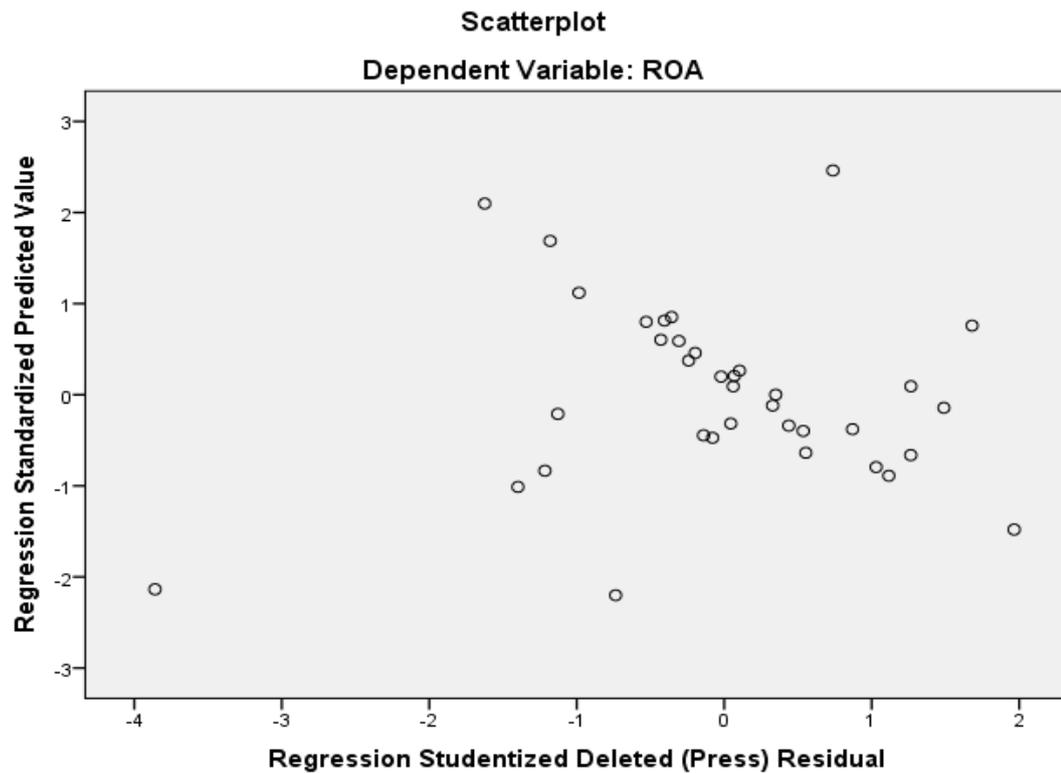
Dari hasil terbut dapat disimpulkan bahwa jumlah Run= 14, jumlah tanda negative $-(n_1)= 18$, jumlah tanda $+(n_2)= 18$. Berdasarkan output tersebut dapat diperoleh nilai sebesar 0,128 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis nihil menyatakan nilai residual menyebar secara acak diterima. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam persamaan regresi tersebut.

1.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2013) menyatakan bahwa data terhindar dari heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas dengan

diagram scatterplot terhadap model regresi dalam penelitian ini. Hasil dari uji heteroskedasitas dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 4.1 Diagram Scatterplot



Sumber : Olah Data Sekunder

Berdasarkan gambar dari hasil uji heteroskestisitas dengan grafik *scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas dan layak digunakan.

1.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 20 diperoleh hasil seperti tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-18.566	6.472		-2.869	.007
Dewan Komisaris	1.027	1.251	.154	.821	.418
Dewan Direksi	3.322	1.132	.757	2.935	.006
Komite Audit	-1.838	1.181	-.354	-1.556	.130
DPS	-1.767	1.894	-.153	-.933	.358
CAR	.588	.149	.641	3.946	.000

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Olah data sekunder

Hasil output analisis regresi linier berganda diatas sebagai berikut :

$$ROA = \beta_0 -18,566 + \beta_1 1,027 \text{ Dewan Komisaris} + \beta_2 -3,322 \text{ Dewan Direksi} + \beta_3 -1,838 \text{ Komite Audit} + \beta_4 -1,767 \text{ Dewan Pengawas Syariah} + \beta_5 0,588 \text{ CAR} + e$$

Keterangan

ROA : *Return On Assets*

B : Konstanta

β_1 – β_6 : Koefisien Regresi

E : *Error Terms*

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar -18.566 menunjukkan bahwa apabila Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, DPS dan CAR diasumsikan tetap, maka nilai konstanta *return on assets* adalah -18.566.
2. Dewan Komisaris = 1,027 artinya dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*. Apabila ukuran dewan komisaris semakin baik maka dapat meminimalisir *Return On Asset*.
3. Dewan Direksi = 3,322 artinya dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*. Apabila ukuran dewan direksi dilakukan dengan manajemen yang baik, maka Bank Umum Syariah dapat menghasilkan rasio *Return On Asset* yang semakin baik.
4. Komite Audit = -1,838 artinya komite audit berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*. Apabila ukuran komite audit dilakukan dengan manajemen yang baik, maka Bank Umum Syariah dapat menghasilkan rasio *Return On Asset* yang semakin baik.
5. DPS = -1,767 artinya dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*. Apabila ukuran dewan pengawas syariah semakin baik maka dapat meminimalisir *Return On Asset*.
6. CAR = 0,588 artinya CAR berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*. Apabila ukuran CAR dilakukan dengan manajemen yang baik, maka Bank Umum Syariah dapat menghasilkan rasio *Return On Asset* yang semakin baik.

4.2.4 Uji Koefisien Determinan R²

Hasil dari uji koefisien determinasi dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Uji R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.640 ^a	.410	.312	4.46130

a. Predictors: (Constant), CAR, Komite Audit, DPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Olah Data Sekunder

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai Adjusted R² dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya kinerja keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,312 (31.2%). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran CAR mampu mempengaruhi kinerja keuangan sebesar 31.2% dan sisanya 68.8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Signifikansi (Uji F)

Hasil uji F dengan program SPSS 20 disajikan seperti tabel berikut :

Tabel 4.9

Uji Signifikansi (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	415.032	5	83.006	4.171	.005 ^b
Residual	597.095	30	19.903		
Total	1012.127	35			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), CAR, Komite Audit, DPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

Sumber : Olah data sekunder

Berdasarkan tabel 4.8 ANOVA diperoleh koefisien signifikan menunjukkan nilai signifikan 0,005 dengan nilai F_{hitung} 4,171 dan F_{tabel} 3,21. Artinya bahwa $Sig < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($0,005 < 0,05$ dan $4,171 > 3,21$) yang bermakna bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan atau dapat dikatakan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, DPS dan CAR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

4.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Uji t digunakan untuk menjawab hipotesis yang disampaikan dalam penelitian.

Adapun kesimpulan jika:

1. $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau nilai $Sig > 0,005$, maka H_0 ditolak.
2. $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau nilai $Sig < 0,005$, maka H_0 diterima.

Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-18.566	6.472		-2.869	.007
Dewan Komisaris	1.027	1.251	.154	.821	.418
Dewan Direksi	3.322	1.132	.757	2.935	.006
Komite Audit	-1.838	1.181	-.354	-1.556	.130
DPS	-1.767	1.894	-.153	-.933	.358
CAR	.588	.149	.641	3.946	.000

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Olah data sekunder

Berdasarkan output pada tabel diatas, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil untuk variabel dewan komisaris (X1) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,418 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H1 ditolak yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

2. Pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil untuk variabel dewan direksi (X2) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,006 < 0,05$ maka jawaban hipotesis

yaitu H2 diterima yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

3. Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil untuk variabel komite audit (X3) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,130 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H3 ditolak yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

2. Pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil untuk variabel dewan pengawas syariah (X4) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,358 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H4 ditolak yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

2. Pengaruh CAR terhadap kinerja keuangan.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil untuk variabel CAR (X5) menunjukkan bahwa dengan signifikan $0,000 < 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H5 diterima yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

Berdasarkan hasil Hipotesis pertama (H_{a1}) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris yang diproksikan dengan ROA. Artinya jumlah dewan komisaris yang lebih banyak ternyata kurang efektif dalam pengawasan pada Bank Umum Syariah. Ditunjukkan melalui hasil Uji t, dimana X1 sebagai variabel independent (ukuran dewan komisaris) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig $> 0,05$. Yaitu diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,821 dengan nilai sig 0,418 yang lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*.

Semakin tinggi jumlah anggota dewan komisaris ternyata tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap peningkatan pengendalian aset perusahaan atau ROA yang diperoleh. Jumlah dewan komisaris tidak dapat menjamin keefektifan kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengawasan melakukan pengawasan terhadap Direksi dan tidak dapat menjamin keefektifan dalam membantu meningkatkan kinerja perusahaan pada Bank Umum Syariah (Irmala Sari, 2010).

Hal ini diakibatkan karena kurangnya tanggung jawab dan pemanfaatan wewenang dewan komisaris sebagai pengawas manajemen serta dinilai tidak dapat memberikan pengawasan atas tindakan yang diperlukan kepada pihak manajemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Irmala Sari (2010) yang membuktikan bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

4.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

Berdasarkan hasil Hipotesis (H_{a2}) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA. Ditunjukkan melalui hasil Uji t, dimana X^2 sebagai variabel independent (ukuran dewan direksi) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < 0,05$. Yaitu diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,935 dengan nilai sig 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*.

Perbankan syariah telah mengelola sistem tata kelola usahanya dengan baik sehingga dapat menetapkan anggota dewan direksi yang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan, memimpin dengan kebijakan yang baik, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian, menyetujui anggaran tahunan perusahaan serta menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan sehingga kinerja keuangan dan *return on asset* pun meningkat pengelolaan aset yang baik

dapat meningkatkan laba meningkatkan laba perusahaan yang berdampak pada kenaikan ROA. Manajer perusahaan dengan dewan direksi yang lebih besar diharapkan dapat mengurangi perilaku dalam oportunistik manajemen laba yang dapat memperburuk kualitas angka pendapatan pihak yang berkepentingan (Bradbury et al., 2006; Ismail et al., 2009).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Ika Kartika (2014) yang juga membuktikan bahwa variabel ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

4.4.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

Berdasarkan hasil Hipotesis (H_{a3}) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan yang diprosikan ROA. Ditunjukkan melalui hasil Uji t, dimana X3 sebagai variabel independent (ukuran komite audit) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig $> 0,05$. Yaitu diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1,556 dengan nilai sig 0,130 yang lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*.

Jumlah komite audit yang lebih banyak ternyata kurang efektif dalam pengawasan pada Bank Umum Syariah serta tidak dapat menjamin keefektifan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Pembentukan dari komite audit dalam suatu perusahaan hanya atas dasar untuk pemenuhan regulasi yang mesyaratkan bahwa perusahaan harus membentuk komite audit. Kurang optimalnya komite audit dalam menjalankan tanggung jawab terhadap tugas dan wewenangnya berdampak pada pelaporan kinerja manajemen yang tidak andal dan efektif mengakibatkan manajemen tidak dapat menjalankan usahanya nya dengan baik sehingga perusahaan mengalami kerugian finansial (Fauzi, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Diandono (2012) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Tidak adanya pengaruh dari jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dikarenakan peran komite audit kurang optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pada manajemen perusahaan.

4.4.4 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

Berdasarkan hasil Hipotesis (H_{a4}) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan pengawas syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan yang diproksikan terhadap ROA. Ditunjukkan melalui hasil Uji t, dimana X_4 sebagai variabel independent (ukuran DPS) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig $> 0,05$. Yaitu diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,933 dengan nilai sig 0,358 yang lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya ukuran DPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*.

Besarnya jumlah anggota dewan pengawas syariah (DPS) tidak dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat mengurangi profitabilitas (Achmad Noor Fauzi,2016).

Dengan demikian, profitabilitas bank akan menurun. Artinya jumlah dewan pengawas syariah yang lebih banyak ternyata kurang efektif dalam pengawasan. Hal ini karena dewan pengawas syariah yang ada di dalam sebuah bank mempunyai rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah juga di bank lain yang mengakibatkan kurang baik atau kurang fokusnya kinerja seorang dewan pengawas syariah tersebut dalam mengawasi sebuah bank (Achmad Noor Fauzi,2016). Sehingga kinerja dewan pengawas syariah dianggap kurang baik dan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perbankan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diandono (2012) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja

keuangan. Tidak adanya pengaruh dari jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dikarenakan peran komite audit kurang optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pada manajemen perusahaan.

4.4.5 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

Berdasarkan his Hipotesis (H_{a5}) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang diproksikan dengan Basel II terhadap kinerja keuangan yang diproksikan ROA. Ditunjukkan melalui hasil Uji t, dimana X5 sebagai variabel independent (CAR) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Yaitu diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,946 dengan nilai sig 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*.

CAR atau rasio kecukupan modal merupakan salah satu indikator kesehatan permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko misalnya pembiayaan yang diberikan. Besar modal bank yang ditunjukkan oleh CAR telah memadai kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha perbankan syariah yang bersangkutan.

Semakin besar rasio kecukupan modal maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah (Eko Sumarsono, 2015). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank tersebut.

Hasil penelitian ini sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari (2014) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dimana perusahaan dapat mengoptimalkan modal yang ada.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

4.3 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah dan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di ank Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel 12 perbankan syariah di Indonesia selama tiga tahun yaitu 2015-2017. Sehingga sampel yang digunakan sebanyak 36. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan *purposive sampling*. Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah program SPSS 20.0. Adapun kesimpulan dalam penelitian berikut:

- a. Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
- b. Ukuran dewan direksi dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

5.2 Keterbatasan Masalah

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan revisi untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Dalam penelitian ini belum mengkaji variabel lain yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah.
2. Penelitian ini hanya dilakukan selama 3 (tiga) tahun sehingga untuk melihat tingkat pengaruhnya masih rendah dan sangat terbatas.
3. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian dari lembaga bank umum syariah saja sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk semua jenis perbankan syariah dan unit usaha syariah.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel atau jenis perusahaan yang berbeda sebagai pembandingan, seperti memasukkan atau menambahkan Unit Usaha Syariah sebagai salah satu sampel dalam penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan indikator lain dalam hal pengukuran tata kelola usaha dan implementasi basel II serta kinerja keuangan perbankan syariah.
3. Menambah periode penelitian menjadi lebih panjang agar efek dari mekanisme tata kelola usaha dan implementasi basel II dapat lebih dirasakan dalam mempengaruhi kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah.
4. Penelitian kedepan selanjutnya disarankan untuk mengubah variabel basel II menjadi basel III yang kabarnya akan segera diperbarui.

Daftar Pustaka

- Achmad, Noor Fauzi “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan”, IAIN Surakarta: 2016.
- Adi, Rahmannur Ibnu, 2016. “Basel II dalam Perspektif Hukum Islam”. *Tesis*
- Ajeng Andriani dan Abdul Rozak, 2016. “Analisis Pengaruh Penerapan Basel Capital Accord dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Arry Eksandy “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari’ah Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Tangerang : 2018.
- Baird, M., *The Proper Governance of Companies Will Become as Crucial to the World Economy as the Proper Governing of Countries*, Paper, 2000.
- Bambang, Kesowo “Beberapa Prinsip dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas”, Newsletter No. 24/1996, Pusat Pengkajian Hukum, 1996.
- Bambang Riyanto, 1997, *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan*, Edisi 4. BPFE, Yogyakarta.
- Basel Committee on Banking Supervision, 2016. *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised Framework. Bank For International Settlement*.
- Beasley, M. 1996. *An Empirical Analysis Of The Relation Between The Board Of Director Composition And Financial Statement Fraud*. The Accounting Review. Vol. 71. Pp.443-465.
- Bradbury, M. E., Mak, Y.T., & Tan, s. m. (2004). *Board Characteristic, Audit Committee Characteristic and Abnormal Accruals*. *SSRN Electronic Journal*.

- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 2008.
- Chtourou, S.M., J. Bedard. 2001. *Corporate Governance and Earnings Manajement*. <http://www.ssrn.com>.
- Darmawan, Dorry “*Pelaksanaan Pembiayaan KPR Muamalat iB Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah dan Ijarah di Bank Muamalat Cabang Cilegon*”, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung : 2014.
- Dr.Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah edisi dua*, , M.A.,2009.
- Efendi (2009) *The Power Of Good Corporate Governance*, Teori Dan Implementasi, Jakarta: Salemba Empat.
- Eko, Sunarwan “*Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2015.
- Gujarati, N.D. 2003. *Basic Econometrics*. 4th ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Mulivariate dengan program IBM SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang. Badan Penerbit UNDIP
- Hanafi, Mahduh dan Abdul Halim, 2012, *Analisis Laporan Keuangan*.
Yogyakarta: (UPP) STIM YKPN
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1-10.
Jakarta: Rajawali Pers.
- I, Gusti Bagus Wira Irawan. “*Pengaruh Implementasi Basel II Terhadap Kinerja Keuangan Bank di Indonesia*”, Universitas Gunadarma: 2009.
- Ismail Salaheldin, S. (2009). *Critical success factors for TQM implementation and their impack on performance of SMEs*. Internationak Journal of

Productivity and Performance Managemen, 58 (3), 215-237.
<https://doi.org/10.1108/17410400910938832>

Isshaq, Z., Bokpin, G. A., & Onumah, J. M. 2009. "Corporate Governance, Ownership Structure, Cash Holdings, and Firm value on the Ghana Stock Exchange". *The Journal of Risk Finance* Vol. 10.

Jensen, M.C. (1993), "*The modern industrial revolution, exit and the failure of internal control systems,*" *Journal of Finance*, Vol 48, No 3, pp. 831-880.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics.

Karim (2004) *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lastanti, Sri Hexana. 2004. *Hubungan Struktur Corporate Governance dengan*

Kinerja Keuangan dan Reaksi Pasar, Konferensi Nasional Akuntansi:

Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance.

Lulu, Badriah (2018). *Perbankan Syariah: Kinerja yang Buruk karena Tata Kelola*. <http://infobanknews.com/perbankan-syariah-kinerja-yang-buruk-karena-tata-kelola/>

KNKCG (2004) *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance

- Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2017). *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach (10th ed)*. United States of America, New York: McGraw-Hill Education.
- Muhammad Arif. “*Strategi Pemasaran Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di BTN Syariah Cabang Tangerang*”. UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Nur, Hisamuddin dan M.Yayang Tirta K “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*”, Universitas Jember : 2010
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), Statistik Perbankan Syariah, OJK Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Perizinan Informasi Perbankan, 2015.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Peraturan pemerintah No.64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.
- Perumal, Shanmugan (2005) *Governance Issues and Banking*. “Dalam Vaseehar Hasan et al. *Corporate Governance: an Islamic Paradigma*”. Serdang: Universiti Putra Malaysia Press. 1- 10.
- Peraturan Bank Indonesia NOMOR 11/ 33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rukmana, 2010, *Bank Syariah, Teori, kebijakan, Dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta :Erlangga.

Sapsepti, Gita “*Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, Bandung (2017).

Scott, William R. (1997). *Financial Accounting Theory*. International Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Pertama, Bandung: CV. Alfabeta, 1999.

Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Sunandar, Heri, "*Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah di Indonesia*", Hukum Islam Vol. IV Nomor 2, Desember 2005.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 30 April 2010, Hlm. 2.

Wahyudi, Dkk (2013) *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat.

Wardhani, Ratna. 2006. *Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms)*. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. Hal: 1-26.

Watts, R, L., & Zimmerman, J, L. (1986). *Positive Accounting Theory*. United States of America, New York: Prentice Hall.

Yermack, D. (1996), “*Higher market valuation of companies with a small board of directors,*” *Journal of Financial Economics*, Vol 40, pp. 185 – 211.

www.bi.go.id

www.infobanknews.com

www.syariahmandiri.co.id

www.megasyariah.co.id

www.bri.syariah.co.id

www.bcasyariah.co.id

www.paninbanksyariah.co.id

www.maybanksyariah.co.id

www.bankvictoriasyariah.co.id

www.syariahbukopin.co.id



Institut Informatika & Bisnis
DARMAJAYA

Yayasan Atfian Husin
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142 Telp 787214 Fax. 700261 http://darmajaya.ac.id

FORMULIR

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN (BAAK)

FORM KONSULTASI/BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR *)

N A M A : AULIATA GUSTI RAHAYU.....
 N P M : 1512120028.....
 PEMBIMBING I : Delli Maria, S.E., M.Sc.....
 PEMBIMBING II :
 JUDUL LAPORAN : Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Implementasi Basel II Terhadap Kinerja Keuangan...
 Perbankan Syariah di Indonesia.....
 TANGGAL SK : s.d (6+2 bulan)

No	HARI/TANGGAL	HASIL KONSULTASI	PARAF
1	13/11	Revisi Bab 1, 2, 3	Delli
2	20/11 2018	Revisi Bab 1, 2, 3	Delli
3	15/11	Ace Swara Propon 1.	Delli
4	19/12 2018	Konsultasi judul	Delli
5	11/1 2019	Revisi - Lanjutan ^{cek 125} _{sup Uji F&E}	Delli
6	1/2019 02	Revisi Bab. 4 (tubuh satu ^{1th} _{consolid})	Delli
7	13/2019 2	Revisi - buku adun ^{Revisi}	Delli
8	18/2	ke Stage Nkps	Delli
9			
10			

*) Coret yang tidak perlu

Bandar Lampung,
Ketua Jurusan

(ANIK IRAWATI, S.E., M.Sc)
NIK. 01170305



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IIB DARMAJAYA
NOMOR : SK.0137/DMJ/DFEB/BAAK/III-19**

**Tentang
Dosen Penguji Skripsi
Semester Ganjil TA.2018/2019
Program Studi S1 Akuntansi**

REKTOR IIB DARMAJAYA

- Memperhatikan :** 1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan mutu dan peranan **Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya** dalam melaksanakan Pendidikan Nasional perlu ditingkatkan kemampuan mahasiswa dalam **Ujian Skripsi**
- Menimbang :** 2. Laporan dan usulan Ketua Program Studi **S1 Akuntansi**.
1. Bahwa untuk mengefektifkan tenaga pengajar dalam mahasiswa perlu ditetapkan **Dosen Penguji**.
2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat :** 1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/0/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya
4. STATUTA IBI Darmajaya
5. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin No. IM.003/YP-AH/X-08 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi
6. Surat Keputusan Rektor 0383/DMJ/REK/X-08 tentang Struktur Organisasi.
- Menetapkan**
- Pertama :** Mengangkat nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai **Dosen Penguji** mahasiswa Program Studi **S1 Akuntansi**.
- Kedua :** Penguji berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Ketiga :** **Penguji** yang ditunjuk akan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan norma penggajian dan honorarium **Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya**.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 11 Maret 2019
a.n. Rektor IIB Darmajaya,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, M.S., Ph.D
NIK.14580718

Tembusan :

1. Ketua Jurusan S1 Akuntansi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor IIB Darmajaya
 Nomor : SK. 0137/DMJ/DFEB/BAAK/III-19
 Tanggal : 11 Maret 2019
 Perihal : Penguji Penulisan Skripsi
 Program Studi Strata Satu (S1) Akuntansi

DAFTAR DOSEN PENGUJI SIDANG SKRIPSI

No.	NPM	Nama	Judul	Pembimbing	Penguji	Ruang / Waktu	Hari / Tanggal
55	1512120128	ELISABETH ESTY D T	GANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DENGAN KONFLIK KOG	Anik Irawati, S.E., M.Sc	1	Nolita Yeni Siregar, S.E., Ak., M.S.Ak	E 2.2 Jum'at
					2	Taufik, SE., M.S.Ak	08.00 - 10.00 08-Mar-19
56	1512120012	NABILA OKTAVIANA	PENGARUH RELIGIUSITAS, PERSEPSI MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN DAN KEADILAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA TANJUNG KARANG)	Anik Irawati, S.E., M.Sc	1	Jaka Darmawan, S.E., Ak., M.Ak., CA., CPAI	E 2.1 Jum'at
					2	Reva Meliana, S.E, M.Acc,AK	13.00 - 15.00 08-Mar-19
57	1212120007	ELSHINTA LIUSIANA K	ANALISIS MENGENAI MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)	Dedi Putra, S.E., M.S.Ak	1	Delli Maria, S.E., M.Sc	E 3.1 Jum'at
					2	Pebrina Swissia, S.E., M.M	10.00 - 12.00 08-Mar-19
58	1512120028	AULIATA GUSTI RAHAYU	PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN IMPLEMENTASI BASEL II TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH	Delli Maria, S.E., M.Sc	1	Muhammad Sadat Pulungan, M.M., M.S.Ak	E 2.2 Jum'at
					2	Dedi Putra, S.E., M.S.Ak	13.00 - 15.00 08-Mar-19
59	1512120075	SHENI NOVIKA RAHMA	IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MENUNJANG KINERJA UMKM (STUDI KASUS PADA SENTRA INDUSTRI KERIPIK PISANG GANG PU BANDAR LAMPUNG)	Nolita Yeni Siregar, S.E., Ak	1	Anik Irawati, S.E., M.Sc	E 2.3 Jum'at
					2	Reva Meliana, S.E, M.Acc,AK	08.00 - 10.00 08-Mar-19
60	1512120125	YESSIANA	ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, KURS, COUPON RATE, LIKUIDITAS OBLIGASI, DAN MATURITY DATE TERHADAP HARGA OBLIGASI PEMERINTAH DI BURSA EFEK INDONESIA	Nolita Yeni Siregar, S.E., Ak	1	Delli Maria, S.E., M.Sc	E 3.1 Jum'at
					2	Pebrina Swissia, S.E., M.M	08.00 - 10.00 08-Mar-19
61	1512120139	DIRA HARDIANTI	PENGARUH PROFITABILITAS, TEKanan PEMANGKU KEPENTINGAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	Pebrina Swissia, S.E., M.M	1	Dr. RZ. Abdul Aziz, M.T	E 2.3 Jum'at
					2	Anik Irawati, S.E., M.Sc	13.00 - 15.00 08-Mar-19
62	1512120123	RINI SONIKA	ANALISIS PENGARUH SEBELUM DAN SESUDAH REVALUASI ASET TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN	Pebrina Swissia, S.E., M.M	1	Muhammad Sadat Pulungan, M.M., M.S.Ak	E 2.2 Jum'at
					2	Taufik, SE., M.S.Ak	15.00 - 17.00 08-Mar-19
63	1512120118	AHITA WIJAYA NINGSIH	PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN BOOK TAX DIFFERENCE TERHADAP MANAJEMEN LABA	Reva Meliana, SE, M.Acc,AK	1	Nolita Yeni Siregar, S.E., Ak., M.S.Ak	E 3.2 Jum'at
					2	Pebrina Swissia, S.E., M.M	13.00 - 15.00 08-Mar-19